BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan teoretis dan empiris agar peneliti dapat memperkaya kajian serta menghindari terjadinya pengulangan atau plagiasi karya ilmiah. Kajian terhadap penelitian sebelumnya juga bertujuan untuk menegaskan posisi penelitian ini sebagai karya ilmiah yang orisinal dan memiliki kebaruan dalam konteks peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi perikanan lokal. Berikut lima penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh Sahron, A. (2024) yang berjudul Kinerja Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada peran pemerintah desa dalam. menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal seperti pertanian dan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi fasilitator, motivator, dan inovator di tingkat lokal. Pemerintah desa yang aktif mendorong partisipasi masyarakat terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi warga. Penelitian ini menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana peran pemerintah desa dapat dioptimalkan dalam sektor perikanan, termasuk pengembangan ikan patin.
2. Penelitian oleh Prihatini, E. (2022) yang berjudul sinergi pemerintah desa

dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya perikanan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan meneliti pola kemitraan antara pemerintah desa dan kelompok nelayan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengembangan potensi perikanan air tawar. Pemerintah desa berperan aktif dalam penyediaan fasilitas, pelatihan, dan pembinaan kelompok usaha perikanan. Penelitian ini relevan dengan penelitian sekarang karena menunjukkan pentingnya sinergi dan keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan usaha budidaya ikan lokal, seperti ikan patin.

3. Penelitian oleh Yusuf, M. & Rahmad, R. (2023) yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Inovasi Ekonomi Lokal di Sektor Perikanan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologis, untuk menelusuri strategi inovasi ekonomi berbasis potensi desa di sektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi ekonomi lokal dapat tumbuh apabila pemerintah desa memiliki komitmen kuat dalam membangun kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan mengembangkan jejaring dengan lembaga pendukung. Pemerintah desa juga terbukti menjadi katalis dalam peningkatan kapasitas kelompok pembudidaya melalui program penyuluhan dan dukungan sarana produksi. Penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa peran pemerintah desa menjadi elemen utama dalam pengelolaan potensi ikan patin secara berkelanjutan.

4. Penelitian oleh Arifin, Z. & Wicaksono, B. (2023) yang berjudul *Village Governance in Managing Local Natural Resources Based on Community Participation*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan good governance untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola desa sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Pemerintah desa yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terbukti mampu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Penelitian ini relevan karena menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dalam pengelolaan sektor perikanan, termasuk potensi ikan patin.
5. Penelitian oleh Suryana, T. (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Desa dalam Peningkatan Produktivitas Perikanan Air Tawar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan desa terkait pengembangan perikanan air tawar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif harus diikuti dengan dukungan sumber daya manusia, sarana, dan komitmen pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian saat ini, yakni bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan potensi ikan patin secara berkelanjutan.

Kelima penelitian di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah desa merupakan faktor strategis dalam mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum secara spesifik membahas peran pemerintah desa terhadap pengembangan potensi ikan patin, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan/novelty dalam konteks lokal dan jenis komoditas perikanan yang akan diteliti dalam pnelitian ini.

Tabel 1 Relevensi Penelitian

No	Nama/Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahron, A. (2024)	Kinerja Pemerintah desa dalam Pemberdayaan Ekonomi berbasis Potensi Lokal	Pemerintah desa berperan penting sebagai fasilator dan motivator dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal.	Sama-sama membahas peran pemerintah desa dan peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal.	Penelitian ini fokus pada penelitian budidaya ikan patin
2.	Prihatini, E. (2022)	Sinergi Pemerintah desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan perikanan.	Sama-sama membahas sektor perikanan dan keterlibatan pemerintah serta masyarakat	penelitian ini secara khusus meneliti budidaya perikanan ikan patin sebagai objek kajian utama, sedangkan penelitian Prihatini (2022) membahas sektor perikanan secara umum tanpa fokus pada komoditas tertentu.

No	Nama/Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Yusuf & ahmad (2023)	Peran Pemerintah desa dalam Iinovasi Ekonomi lokal di Sektor Perikanan	Inovasi ekonomi tumbuh melalui pelatihan,dukun ga n sarana produksi dan kebijakan desa	Sama-sama mengkaji inovasi pemerintah desa dan sektor perikanan.	Tidak fokus pada budidaya/p e mbibitan ikan patin sebagai komoditas unggulan
4.	Arifin & Wicakson (2023)	*Village Governance in Managing Local Based on Community Participation.*	Partisipasi masyarakat menentukan keberhasilan tata kelola potensi lokal.	Sama-sama membahas tata kelola dan partisipatif pemerintah desa	Objek penelitian bukan usaha budidaya atau pembibitan ikan patin
5.	Suryana,T. (2021)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.	Partisipasi masyarakat kesejahteraan ekonomi desa	Sama-sama menyoroti pemberdayaan perikanan	Meneliti peran strategis pemerintah desa secara mendalam.

Sumber : data diolah 2026

B. Landasan Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintahan desa menjadi perpanjangan tangan negara dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk

mengatur rumah tangganya sendiri demi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut (Rasyid, 2021) , pemerintahan desa adalah fondasi utama pembangunan nasional karena desa menjadi titik awal berlangsungnya interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang paling nyata. Secara struktur, pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan. Kepala Desa berfungsi sebagai pimpinan pemerintahan dan penentu arah kebijakan pembangunan; Perangkat Desa berperan sebagai pelaksana teknis administratif, sedangkan BPD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan (Sutopo, 2022). Hubungan antara ketiga unsur tersebut mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan desa juga dapat dikaji dari tiga aspek utama, yaitu:

1) Aspek kelembagaan, yang mencakup struktur dan mekanisme kerja lembaga pemerintahan desa;
2) Aspek kewenangan, yaitu ruang lingkup pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal; dan
3) Aspek pelayanan publik, yang berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat secara efisien dan berkeadilan. (Huda,2023)

b. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa merupakan tanggung jawab yang melekat pada posisi pemerintah sebagai unit pemerintahan. terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Menurut (BIddle, 1986) , peran mengacu pada seperangkat perilaku dan tanggung jawab yang diharapkan dari seseorang atau lembaga berdasarkan status sosialnya. Dalam konteks pemerintahan desa, peran tersebut meliputi kemampuan pemerintah desa dalam mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, serta mengatur masyarakat dalam menjalankan aktivitas pembangunan.

Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi teknis dan administratif, tetapi juga mengambil peran strategis dalam pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2023).

1) Pemerintah sebagai Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Pemerintah merupakan pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik karena memiliki kewenangan dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan publik. Pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan sekaligus koordinator berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, peran pemerintah tidak hanya terbatas pada fungsi pengendalian, tetapi juga sebagai

pengarah dan fasilitator dalam proses pembangunan (Arifin, 2023).

Sebagai *stakeholder* utama, pemerintah bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Dengan demikian, keberhasilan administrasi publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola peran dan hubungan antar pemangku kepentingan (Suharno, 2023).

2) Masyarakat sebagai Pemangku Kepentingan

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Dalam administrasi publik modern, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat mencerminkan prinsip partisipasi dan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan (UNDP, 1997).

Peran masyarakat sebagai *stakeholder* tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Melalui partisipasi aktif,

masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi ini berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan administrasi publik (Arifin, 2023).

3) Sektor Swasta sebagai Pemangku Kepentingan

Sektor swasta merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam administrasi publik yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan sektor swasta memungkinkan pemerintah memperoleh dukungan sumber daya, teknologi, serta inovasi yang dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan publik. Kolaborasi ini menjadi semakin penting dalam menghadapi keterbatasan kapasitas pemerintah (Huda, 2022).

Sebagai *stakeholder*, sektor swasta berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Namun, keterlibatan sektor swasta tetap memerlukan pengawasan dan regulasi dari pemerintah agar pelaksanaan kerja sama tetap selaras dengan kepentingan publik. Dengan pengelolaan yang tepat, kemitraan ini dapat memberikan manfaat bersama bagi pemerintah dan masyarakat (UNDP, 1997).

4) Lembaga Non-Pemerintah sebagai Pemangku Kepentingan

Lembaga non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, juga merupakan pemangku kepentingan penting dalam administrasi publik. Lembaga ini berperan sebagai mitra sekaligus pengawas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Keberadaan lembaga non-pemerintah membantu menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam menyuarakan aspirasi kelompok tertentu (Huda, 2022).

Sebagai *stakeholder*, lembaga non-pemerintah berkontribusi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Keterlibatan lembaga ini memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik karena menciptakan keseimbangan peran antara negara dan masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik dapat berjalan secara lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik (Suharno, 2023).

5) Antar Pemangku Kepentingan

Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan administrasi publik yang efektif dan berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah memungkinkan terjadinya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sinergi ini juga

mendorong terciptanya proses administrasi publik yang lebih transparan dan partisipatif (UNDP, 1997).

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan desa, peran pemerintah desa dapat dikategorikan ke dalam empat fungsi utama yaitu sebagai fasilitator, motivator, regulator, dan inovator. Keempat peran ini menjadi dasar yang komprehensif dalam memahami bagaimana pemerintah desa mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan potensi lokal seperti budidaya ikan patin.

Peran pemerintah desa merupakan inti dari pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah desa tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat. (Kurniawan, 2023) membagi peran pemerintah desa ke dalam empat fungsi utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, regulator, dan inovator. Keempat fungsi ini mencerminkan kompleksitas tanggung jawab pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa berperan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan masyarakat, seperti penyediaan akses jalan, irigasi, dan fasilitas produksi pembibitan ikan patin. Sebagai motivator, pemerintah desa menumbuhkan kesadaran dan semangat gotong royong

agar masyarakat aktif dalam kegiatan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah desa menyusun kebijakan dan peraturan yang mendorong pengelolaan potensi ekonomi lokal secara tertib dan adil. Sementara sebagai inovator, pemerintah desa menciptakan terobosan melalui program atau kebijakan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Prihatini, 2022).

Menurut (Arifin, 2023) , efektivitas peran pemerintah desa ditentukan oleh kemampuan kepemimpinan kepala desa dalam membangun komunikasi, kepercayaan, dan kolaborasi dengan warga. Pemerintah desa yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi dapat memperkuat daya saing desa melalui inovasi lokal, seperti pengembangan komoditas unggulan berbasis sumber daya perairan. Dalam konteks penelitian ini, peran pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ikan patin menunjukkan bentuk konkret dari fungsi pemerintahan yang responsif terhadap potensi lokal.

Ada 4 peran pemerintah yaitu:

1) Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan dan pengembangan potensi lokal. Peran ini mencakup

penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas umum, ruang pertemuan, akses air, jaringan irigasi, hingga penyediaan tempat atau lahan pendukung kegiatan. Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi masyarakat dengan memberikan akses terhadap informasi, pendampingan teknis, serta penyuluhan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan sosial.

2) Peran Sebagai Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator menekankan pada upaya menggerakkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah desa berperan memberikan dorongan moral, semangat, dan keyakinan agar masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam pengembangan potensi desa. Dorongan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pertemuan kelompok, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

3) Peran Sebagai Regulator

Peran pemerintah desa sebagai motivator menekankan pada upaya menggerakkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah desa berperan memberikan

dorongan moral, semangat, dan keyakinan agar masyarakat mampu terlibat secara aktif dalam pengembangan potensi desa. Dorongan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pertemuan kelompok, serta pelibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa.

4) Peran Sebagai Inovator

Sebagai inovator, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mendorong munculnya pembaruan dalam strategi pembangunan dan pengembangan potensi desa. Peran ini menuntut pemerintah desa untuk mencari cara-cara baru yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa berupaya memperkenalkan metode kerja baru, teknologi yang lebih modern, serta praktik yang dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas potensi lokal.

c. Tata Kelola Pemerintah Desa (*Good Governance* Desa)

Tata kelola pemerintahan desa, atau yang dikenal juga sebagai *village governance*, merupakan perwujudan prinsip-prinsip *good governan*ce di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Konsep ini tidak hanya terbatas pada administrasi rutin, melainkan mencakup serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan pemerintahan yang

transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, efektif, dan efisien (Huda, 2022). Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, tata kelola desa yang baik menjadi fondasi penting meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal demi mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

Teori *good governance* menekankan pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Menurut (UNDP, 1997), prinsip utama *good governance* meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas, keadilan, dan akuntabilitas. Dalam konteks pemerintahan desa, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana praktik pemerintahan yang baik mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal (Dwiyanto, 2022). Penerapan *good governance* dalam pemerintahan desa berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah desa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola program budidaya ikan patin, misalnya, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan (Huda, 2022).

Implementasi *village governance* yang efektif membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga Badan Permusyawaratan

Desa (BPD). Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat desa juga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan setiap proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di desa. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, investor akan merasa lebih aman dan percaya untuk menanamkan modalnya di desa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peran Strategis Desa dalam Sistem Pemerintahan yaitu untuk menjembatani Kesenjangan dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran krusial dalam menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan warga negara, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Rasyid, 2021) . Keberhasilan tata kelola desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk menjalankan fungsinya secara

efektif, membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat, serta mengelola potensi lokal yang dimiliki secara berkelanjutan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan tersebut, serta melaksanakan program pembangunan yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah desa juga harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan desa.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Melalui penyediaan layanan dasar yang berkualitas, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi lokal, pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali.

Ada beberapa faktor yang Mempengaruhi Kualitas *Governance* Desa yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, 2023) menyoroti bahwa kualitas governance desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala desa dan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan pembangunan ke dalam program yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Kemampuan ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam,

serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, faktor-faktor lain yang juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas *governance* desa antara lain kualitas sumber daya manusia (SDM), ketersediaan anggaran, pengawasan yang efektif, serta kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait.

Kemudian kualitas SDM aparatur desa merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Aparatur desa yang kompeten, profesional, dan berintegritas akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas SDM aparatur desa melalui pelatihan, pendidikan, dan studi banding.

Lalu ketersediaan anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta pendapatan asli desa (PAD) harus dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dialokasikan untuk yangPrioritaskan program-program kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan anggaran desa.

Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Administrasi Publik:

1) Akuntabilitas

Menjamin pertanggungjawaban publik pemerintah dan harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta dapat memberikan penjelasan yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Sedarmayanti, 2020) . Akuntabilitas tidak hanya berarti bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan etika. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, serta untuk menindaklanjuti temuan audit dan evaluasi.

2) Transparansi

Membuka Akses Informasi Publik: Informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan harus terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memahami bagaimana pemerintah bekerja, memantau kinerja pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus proaktif dalam menyediakan informasi publik, baik melalui media tradisional maupun media digital.

3) Efektivitas dan Efisiensi

Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya Publik: Program dan kegiatan pemerintah harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang

tersedia secara optimal. Efektivitas berarti mencapai hasil yang diinginkan, sedangkan efisiensi berarti mencapai hasil tersebut dengan biaya yang minimal. Pemerintah harus memiliki sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian yang baik untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien.

4) Partisipasi

Melibatkan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Partisipasi dapat mengambil berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, forum warga, dan survei opini publik. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih akurat, memahami kebutuhan masyarakat, dan membangun dukungan publik untuk kebijakan-kebijakan yang diambil.

5) Responsivitas

Merespon Kebutuhan Masyarakat dengan Cepat dan Tepat: Pemerintah harus mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. Responsivitas berarti mendengarkan keluhan masyarakat, menindaklanjuti masalah yang ada, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah harus memiliki sistem pelayanan publik yang efisien, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

6) Keadilan

Menjamin Kesetaraan dan Inklusi: Semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan pelayanan publik yang adil dan merata (Thoha, 2021). Keadilan berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi.

Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya.

2. Administrasi publik

A. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas permasalahan masyarakat dan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif (Denhart, 2003) . Perkembangan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses evolusi pemikiran yang melahirkan sejumlah paradigma. Paradigma paradigma ini digunakan untuk memahami bagaimana administrasi publik menjalankan fungsinya, bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, serta bagaimana kebijakan publik dikelola dan diimplementasikan

B. Paradigma Administrasi Publik

Empat paradigma yang sering dijadikan rujukan dalam

evolusi administrasi publik ialah *Old Public Administration* (OPA), *New Public Administration* (NPA*), New Public Management* (NPM), *dan New Public Service* (NPS) (Osborne, 2001). Dalam era global yang terus berubah, administrasi publik harus adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan disrupsi teknologi. Masing-masing paradigma ini tidak hanya menggambarkan perubahan cara pandang, namun juga menunjukkan pergeseran nilai dan orientasi administrasi publik sebagai sistem sosial (Suharno, 2023).

Administrasi publik Merupakan bidang ilmu yang terus berkembang mengikuti perubahan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola pelayanan dan pembangunan. Perkembangan tersebut memnculkan berbagai paradigma sebagai cara pandang para ahli dalam menjelaskan peran dan fung si administrasi publik dalam merespons kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, evolusi administrasi publik dapat dilihat melalui empat paradigma utama, yaitu *Old Public Administration* (OPA*), New Public Administration* (NPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Service* (NPS) (Denhart, 2003) Setiap paradigma menawarkan konsep dan karakteristik yang berbeda.

1) *Old Public Administration* (OPA)

Paradigma OPA berakar dari pemikiran (Wilson, 1887) yang menekankan pentingnya memisahkan urusan politik dan

administrasi agar birokrasi tetap netral.

Pendekatan ini menggambarkan sistem kerja yang hierarkis, bergantung pada aturan, dan sangat prosedural. Dalam konteks pemerintahan desa, OPA memperlihatkan desa sebagai pelaksana kebijakan yang sudah diputuskan ditingkat atas, artinya pemerintah desa lebih banyak menjalankan instruksi dibanding terlibat dalam inovasi. Situasi ini sering membuat birokrasi desa kurang berperan dalam pengembangan potensi lokal, termasuk dalam kegiatan pembibitan ikan patin, karena fokusnya hanya pada kepatuhan administratif.

2) *New Public Administration* (NPA)

Paradigma NPA, yang dipelopori oleh (Leswell, 1927) dan dikembangkan oleh (Denhart, 2003), muncul sebagai kritik terhadap pendekatan administrasi klasik yang dianggap terlalu mengejar efisiensi semata. NPA menegaskan bahwaadministrasi publik harus berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan manfaat bagi masyarakat. Pada konteks desa, pendekatan ini memandang pemerintah desa bukan hanya sebagai pelaksana teknis,tetapi sebagai pihak yang memastikan kegiatan pembibitan ikan memberi dampak bagi kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Fokusnya tidak hanya hasil ekonomi, tetapi juga pemerataan manfaat dan keadilan bagi warga.

3) *New Public Management* (NPM)

NPM dipopulerkan oleh (Osborne, 2001) yang menekanan penggunaan prinsip manajemen sektor swasta dalam pelayanan publik. Paradigma ini mendorong pemerintah untuk bekerja secara efisien, inovatif, berorientasi hasil, serta terbuka terhadap kemitraan dan kompetisi. Dalam pengelolaan potensi ikan lokal, pendekatan NPM mengajak pemerintah desa untuk mencari cara-cara naru yang lebih efektif, misalnya memperkuat kelompok pembudidaya, memakai teknologi pemebnihan, atau bermitra dengan pelaku usaha. Intinya,paradigma ini menuntut kreativitas pemerintah desa agar pengembangan ikan patin tidak hanya bertahan, tetapi menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar.

4) *New Public Service* (NPS)

Paradigma NPS diperkenalkan oleh (Denhart, 2003) sebagai kritik terhadap birokrasi tradisional dan pendekatan pasar dalam NPM. NPS menekankan bahwa tugas pemerintah adalah melayani, bukan mengendalikan (serving,not steering). Masyarakat dipandang sebagai warga negara (citizens), bukan sekedar pelanggan. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan warga harus didasarkan pada nilai demokrasi, kolaborasi, dan partisipasi.

C. Dimensi Administrasi

(Keban, 2004) menjelaskan bahwa administrasi publik dapat dipahami melalui enam dimensi utama yang saling terkait bagaimana pemerintah melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keenam dimensi tersebut meliputi: dimensi kebijakan publik, dimensi organisasi, dimensi manajemen publik,dimensi etika publik,dimensi kapasitas pemerintahan, serta dimensi demokrasi dan akuntabilitas. Masing-masing dimensi memberikan gambaran menyeluruh mengenai cara kerja administrasi publik dalam mencapai tujuan pembangunan.

1) Dimensi Kebijakan Publik

Dimensi kebijakan publik menekankan pentingnya tahapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sebagai inti dari administrasi publik. Pemerintah dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam konteks pengembangan potensi ikan lokal, dimensi ini tercermin melalui penyusunan regulasi, dimensi ini tercermin melalui penyusunan regulasi,program, serta pengalokasian anggaran desa yang diarahkan untuk mendukung kegiatan budidaya ikan patin.

2) Dimensi Organsasi

Administrasi publik berkaitan erat dengan keberadaan struktur organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan.

Struktur yang teratur,pembagian peran yang jelas, serta mekanisma koordinasi yang baik menjadi faktor penting bagi efektivitas kerja kelembagaan. Pada tingkat desa,perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kelompok budidaya ikan harus berada dalam pola kerja yang terkoordinasi agar program pembibitan ikan dapat terlaksana secara optimal.

3) Dimensi Manajemen Publik

Dimensi manajemen publik berfokus pada kemampuan pemerintah dalam mengelola berbagai sumber daya, seperti dana, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan tersebut. Dalam pelaksanaan budidaya ikan patin, pemerintah desa dituntut memiliki kapasitas manajerial dalam merencanakan kegiatan, mengelola bantuan, menyediakan pendampingan atau penyuluhan, serta menjaga kelangsungan program agar tetap berjalan efektif.

4) Dimensi Etika Publik

Menurut Keban, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga harus didasarkan pada nilai moral. Etika publik mencakup integritas, transparansi, keadilan, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada pengembangan potensi ikan lokal, penerepan etika pubik tercermin melalui keterbukaan

pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran, distribusi bantuan yang adil kepada pembudidya, serta sikap profesonal perangkat desa selama pelaksanaan program.

5) Dimensi Kapasitas Pemerintahan

Dimensi kapasitas pemerintahan merujuk pada kemampuan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki,termasuk kualitas sumber daya manusia, kemampuan kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi. Kapasitas tersebut berpengaruh langung terhadap kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan desa. pada program budidaya ikan patin, kapasitas pemerintah desa tampak dari kemampuan bekerja sama dengan dinas perikanan, penyuluh, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan teknik budidaya serta penguatan kelembagaan pembudidaya.

6) Dimensi Demokrasi dan Akuntabilitas

Dimensi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta mekanisme pertanggungjawaban dalam proses pemerintahan. Administrasi publik harus dijalankan secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam pengembangan budidaya ikan patin, dimensi demokrasi dan akuntabilitas tercermin pada keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran, serta pelaporan hasil pelaksanaan

program kepada warga.

D. Peran Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut tidak terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai kepentingan untuk mencapai kesejahteraan bersama (Dwiyanto, 2022).

Dalam pelaksanaannya, administrasi publik berperan sebagai perumus kebijakan publik yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Peran ini menuntut aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang baik terhadap permasalahan publik serta kemampuan menerjemahkannya ke dalam program yang realistis (Kurniawan, 2023).

Selain itu, administrasi publik berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan sarana, prasarana, serta dukungan teknis yang diperlukan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Peran fasilitatif ini sangat

penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menciptakan pembangunan yang inklusif (Prihatini, 2022).

Administrasi publik juga berperan sebagai penggerak dan pengawas dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menjalankan peran tersebut secara optimal, administrasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (Huda, 2022).

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu kelompok agar mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dimiliki secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan.. Menurut (Suryana, 2021) , pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan kemandirian melalui peningkatan kapasitas, partisipasi aktif, dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Dalam konteks pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting untuk mewujudkan masyarakat pembangunan partisipatif. Pemberdayaan mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

a. Tahap penyadaran (*awareness*) adalah masyarakat diberikan pemahaman tentang potensi dan peran mereka dalam pembangunan desa,
b. Tahap pengkapasitasan (*capacity*) adalah peningkatn keterampilan

dan kemampuan masyrakat melalui pelatihan, penyuluhan serta pendampingan,

c. Tahap pendayaan (*empowerment*) adalah masyrakat mulai mengelola potensi ekonmi secara mandiri Rahmad (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan harus melibatkan masyarakat sebagai subjek, buan pembangunan. sekedar objek.

Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat sangat berkaitan dengan optimalisasi potensi lokal. Pemerintah desa berperan penting sebagai fasilator dalam menyediakan sarana prasarana, pelatihan teknis, dan membuka akses kolaborasi dengan pihak eksternal seperti lembaga perikanan, penyuluh, dan lembaga keuangan (Huda, 2022) , melalui proses tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha ekonomi produktif seperti budidaya atau pembibitan ikan patin secara mandiri danberkelanjutan.

Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat, (Mardikanto, 2015) menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial seperti partisipasi, kepercayaan diri, modal sosial, dan kemampuan mengambil keputusan, oleh karena itu, keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan. Sementara itu, (Suryana, 2021) menyatakan bahwa pemberdaayan masyarakat merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatankerja, serta

menciptakan struktur ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam pengembangan potensi lokal khususnya pada kegiatan budidaya ikan patin. Pemberdayaan tercermin melalui pelaksanaan pelatihan teknis budidaya, dukungan pemerintah desa berupa penyediaan fasilitas dan kebijakan pendukung, pembentukan kelompok pembudidaya, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri.melalui proses tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga mampu mencapa kemandirian, meningkatkan keterampilan, dan berpa tisifasi aktif dalam pengembangan potensi perikanan lokal sebagai sumber penghidupan jangka panjang dan berkelanjutan.

4. Budidaya ikan patin

Budidaya ikan patin merupakan salah satu perikanan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi besar untuk dikembangkan terutama di wilayah pedesaan. (Fitriani, 2023) menyatakan bahwa ikan patin memiliki sejumlah unggulan, antra lain laju pertumbuhan yang cepat, efisien pakan yang tinggi, serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi perairan, serta permintaan pasar yang stabil. Dengan berbagai keunggulan tersebut, budidaya ikan patin menjadi salah satu pelung usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Dalam konteks pembangunan desa, pengembangan budidaya ikan patin dapat dilakukan melalui pendekatan rantai nila (*value chain*), yang mencakup tahapan penyediaan indukan unggul, pembibitan, pemeliharaan pembesaran, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memfasilitasi seluruh tahapan tersebut, antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan, pelatihan teknis budidaya, pendampingan kelompok pembudidaya, dan kemitraan usaha (Yusuf, 2023) . Dukungan kebiakan yang konsisten menjadi budidaya ikan patin sebagai salah satu sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain aspek ekonomi, pengembangan budidaya ikan patin juga memberikan kontribusi positif terhadap aspek sosial masyarakat. Aktivitas ini dapat membuka lapangan pekerja baru, meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam bidang perikanan, serta memperkuat semangat kerja sama antarwarga dalam kegiatan ekonomi produktif (Suryana, 2021) . Dengan demikian, budidaya ikan patin tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga berperan sebgai instrumen pemberdayaan masyrakat yang mampu memperkuat struktu ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan ditingkat desa secara berkelanjutan.

5. Teori

A. *Good Governance*

Menurut (Sedarmayanti, 2020) , penerapan *good governance* yang efektif memerlukan komitmen serta keterlibatan aktif seluruh pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya koordinasi yang selaras, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Oleh karena itu, implementasi konsep *good governance* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Selanjutnya, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008) menegaskan bahwa pelaksanaan *good public governance* harus dilandasi oleh nilai-nilai moral sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dan aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan etika dan pedoman perilaku yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam (Mardiasmo, 2018) , pelaksanaan *good governance* ditandai oleh beberapa prinsip utama sebagai berikut:

1) Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, yang didukung oleh kebebasan

berpendapat dan berorganisasi.

2) Supremasi Hukum, yaitu penerapan aturan hukum yang adil, ditegakkan secara konsisten, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.
3) Transparansi, yakni keterbukaan dalam penyediaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
4) Daya Tanggap, yaitu kemampuan lembaga publik dalam merespons dan melayani kepentingan para pemangku kepentingan secara cepat dan tepat.
5) Orientasi Konsensus, yaitu kemampuan pemerintah dalam menengahi berbagai kepentingan untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi masyarakat luas.
6) Keadilan, yaitu pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
7) Efektivitas dan Efisiensi, yaitu pemanfaatan sumber daya publik secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
8) Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan kepada publik atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
9) Visi Strategis, yaitu pandangan jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan historis.

B. Teori Pembangunan Lokal (*Local Development Theory*)

Teori pembangunan lokal menekankan pentingnya pembangunan berbasis potensi dan kearifan lokal. (Friedman, 2010) menyatakan bahwa pembangunan akan berkelanjutan apabila masyarakat menjadi subjek, bukan objek dari pembangunan. Pembangunan lokal harus memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Dalam konteks desa, potensi ikan patin merupakan sumber daya ekonomi yang strategis dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Pemerintah desa memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi, mengarahkan, dan mengintegrasikan potensi lokal tersebut ke dalam program pembangunan. Selain itu, teori pembangunan lokal menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam membangun sinergi antara sumber daya alam, manusia, dan kelembagaan sosial (Rahman, 2023).

Peneliti memilih untuk menggunakan teori peran dalam penelitiannya dikarenakan teori tersebut secara konseptual dan praktis mampu menjelaskan bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi, tanggung jawab, serta pola interaksi sosialnya

dalam konteks pembangunan lokal. Teori ini berfokus pada perilaku dan tindakan individu maupun lembaga yang menempati posisi sosial tertentu, serta bagaimana peran itu diharapkan dan dinilai oleh masyarakat (Turner, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, teori peran membantu menjelaskan sejauh mana aparat desa menjalankan perannya sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

Menurut Biddle (1986), setiap aktor sosial memiliki seperangkat ekspektasi yang melekat pada status sosial yang dimilikinya. Pemerintah desa, dalam hal ini, diharapkan mampu menyesuaikan tindakan dan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori peran menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi-fungsi strategisnya dalam mengoptimalkan potensi ikan lokal, seperti pembibitan ikan patin, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

C. Teori Peran

Teori peran juga relevan karena memberikan kerangka analisis perilaku organisasi publik dalam konteks sosial dan kelembagaan. Pemerintah desa bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi juga agen perubahan sosial yang memediasi antara kebijakan pemerintah di tingkat atas dengan kepentingan masyarakat di tingkat bawah (Kurniawan, 2023). Dalam

menjalankan fungsi tersebut, pemerintah desa berperan penting dalam mengidentifikasi potensi lokal, mengelola sumber daya, serta membangun kemitraan dengan masyarakat dan pihak lain. Role Theory memungkinkan peneliti memahami bagaimana peran-peran tersebut dibentuk, dijalankan, dan dinilai berdasarkan harapan sosial yang melekat.

Selain itu, teori peran juga dianggap paling sesuai karena mampu menjelaskan dinamika hubungan antara struktur pemerintahan dan perilaku individu di dalamnya. Pemerintah desa beroperasi dalam sistem sosial yang kompleks, di mana setiap aparat memiliki tanggung jawab dan ruang gerak yang diatur oleh norma, kebijakan, serta nilai-nilai lokal (Sari, 2022). Melalui pendekatan teori peran, peneliti dapat menilai apakah fungsi pemerintah desa telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan sejauh mana peran tersebut berkontribusi terhadap pengembangan potensi pembibitan ikan patin.

Dari sisi empiris juga, teori peran juga banyak digunakan dalam studi- studi pemerintahan desa dan pembangunan lokal karena kemampuannya untuk menjelaskan variasi perilaku aktor publik berdasarkan konteks sosial dan budaya. Penelitian oleh (Arifin, 2023) menunjukkan bahwa efektivitas pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah desa memahami dan melaksanakan peran-peran kuncinya secara partisipatif. Hal ini

sejalan dengan penelitian lain oleh (Wijayanti, 2024), yang menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi desa sangat bergantung pada kejelasan peran aparatur dalam membimbing dan memberdayakan masyarakat.

Dibandingkan teori lain seperti *Good Governance* atau *Community Empowerment,* teori peran dinilai lebih menyeluruh karena tidak hanya membahas prinsip tata kelola atau pemberdayaan, tetapi juga menelaah interaksi sosial, harapan masyarakat, dan perilaku birokrasi desa secara simultan. Teori ini memberi ruang analisis yang luas terhadap fungsi nyata pemerintah desa dalam tindakan sehari-hari, termasuk bagaimana mereka menafsirkan peran sebagai pemimpin, pelayan publik, dan penggerak ekonomi lokal (Rahman, 2023).

Secara keseluruhan, teori peran memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami bahwa keberhasilan pengembangan potensi pembibitan ikan patin di desa bergantung pada sejauh mana aparat pemerintah memainkan perannya secara efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dianggap paling sesuai dengan arah dan tujuan penelitian yang ingin mengkaji bentuk, pelaksanaan, serta efektivitas peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis sumber daya perikanan.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual

